

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali, Mahrus & Pramono, Bayu Aji. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta: BPHN. Tanpa tahun.
- Boven, Theo Van. 2002. *Mereka Yang Menjadi Korban*. Jakarta: Elsam.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2005. *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mansur, Didik M. Arief & Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mukianto, Jandi. 2017. *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 2005. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Adnan Buyung. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Pandu, Yudha. 2001. *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*. Jakarta: PT Abadi Jaya.
- Rambe, Ropuan. 2001. *Tehnik Prakter Advokat*. Jakarta: Grasindo.
- Rosenberg, Ruth. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: USAID
- Sartono & Suryani, Bhekti. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Advokat*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamujdi. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*. Surakarta: FH UMS.
- Sunggono, B, & Herianto, A. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarta, Frans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Bantuan Hukum Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

C. Jurnal

Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Indonesia Court Report: Human Trafficking*. Jakarta: Universitas Indonesia Human Right Center.

Daniel, Everd Scor Rider, Nandang Mulyana, & Budhi Wibhawa. 2017. *Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur*. Share: Social Work Journal 7, no. 1.

Marzuki, Abdul Ukas. 2017. *Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia*. Journal Yustisiabel Vol. 1 No. 1.

D. Sumber Lain

Daud, Brian Septiadi dan Eko Sopoyono. 2019. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1. Nomor 3, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6168/3117>

Firmansyah. *7 Korban Trafficking Dipulangkan Polres Banyumas*. NTMC Polri. 28 Mei 2015, <https://ntmcpolri.info/7-korban-trafficking-dipulangkan-polres-banyumas/>

Sumarwoto. *Polres Banyumas Ungkap Perdagangan Manusia*. Antara Jateng. 11 Juni 2016, <https://jateng.antaranews.com/berita/144484/polres-banyumas-ungkap-perdagangan-manusia>

Zuraya, Nidia. *Polisi Banyumas Tangkap Dua Pelaku Perdagangan Orang*. Republika. 22 April 2017, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/04/22/oosfxu383-polisi-banyumas-tangkap-dua-pelaku-perdagangan-orang>